

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dideklarasikan sebagai negara kepulauan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djoeanda. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitarnya, diantara dan di dalam Kepulauan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda. Deklarasi Nusantara (*archipelagic state*) ini pada awalnya mendapat sejumlah tantangan dan rintangan dari negara besar dan kuat di dunia. Setelah melalui perjalanan diplomasi yang panjang, akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) *United Nation on the law of the sea* (UNCLOS, 1982) bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan Nusantara (Baiquni, 2021:3.4).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi geostrategis diantara silang benua (Asia dan Australia) serta samudra (Hindia dan Pasifik). Negara dengan wilayah kepulauan yang sebesar 30% daratan dan 70% lautan ini memiliki potensi kelautan yang amat besar dan beragam, sehingga pantas untuk dijuluki *Mega Marine Biodiversity* yang dapat dikembangkan untuk pelestarian dan pemanfaatan, salah satunya melalui pengembangan usaha wisata bahari. Keragaman hayati dan kebhinekaan sosial budaya, memiliki keunikan dan daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pengembangan pariwisata kepulauan ini memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari,

jaringan usaha multi sektor, percepatan ekonomi daerah kepulauan, penguatan peran serta masyarakat, pengembangan pulau-pulau kecil serta konservasi lingkungan (Baiquni, 2021:3.5).

Bahkan, kepulauan Indonesia memiliki *landscape* dan *marine scape* berupa pulau-pulau dengan hutan dan gunung serta pantai-pantai yang jernih serta terumbu karang *atoll* yang indah sebagai tempat hidup biota laut. Berbagai usaha budidaya mutiara dan rumput laut menjadi penghidupan masyarakat pesisir. Belum lagi berbagai jenis ikan pari yang anggun, ikan karang yang indah berwarna-warni dan berbagai jenis ikan pelagis yang enak dimakan. Berbagai tumbuhan hutan mangrove dan rumput laut menghiasi perairan diberbagai gugusan pulau.

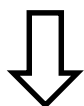
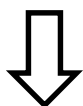
Lebih lanjut, penduduk Indonesia sedang menunjukkan kebangkitan ekonomi maupun kualitas hidupnya, merupakan penghasil produk-produk pariwisata yang menarik bagi pasar global pariwisata. Pun demikian Indonesia juga sedang menggeliat menjadi pasar besar pariwisata yang dilirik oleh investor untuk menangkap peluang pengembangan infrastruktur, fasilitas dan jasa pariwisata lainnya, menunjukkan bahwa bisnis pariwisata Indonesia menjadi ajang pertarungan para pemain bisnis (Baiquni, 2022:9.7).

Perkembangan destinasi pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat sebagai peringkat ke-9 di dunia, ke-3 di Asia, dan ke-1 di Asia Tenggara berdasarkan data pertumbuhan *absolut* periode tahun 2011-2017 menurut penilaian *World Travel and Tourism Council* (WTTC) 2018. Empat (4) indikator yang menjadi penilaian adalah total produk domestik bruto perjalanan dan

pariwisata, belanja wisatawan asing, belanja wisatawan domestik, dan investasi modal pada sektor perjalanan dan wisata (Budisetyorini, 2022:1.21).

Selain itu, sektor pariwisata di Indonesia ditetapkan sebagai sektor unggulan kedua, setelah pertanian sebagai sektor unggulan pertama, dan sektor perikanan sebagai sektor unggulan ketiga (Perpres No.79/2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah, 2018). Menurut *e-performance* pariwisata Indonesia tahun 2018, dikatakan juga bahwa pariwisata sebagai *core* ekonomi Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang diproyeksikan menyumbang devisa sekitar 20 US\$ pada tahun 2019, serta *Country Branding Wonderful* Indonesia telah berhasil mencerminkan *positioning* dan *differentiating* pariwisata menempati ranking 47 dunia, mengalahkan *Country Branding Truly* Asia Malaysia (ranking 96) dan *Amazing* Thailand (ranking 83).

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL Peraturan Pemerintah No. 50/2011 Tentang RIPPARNAS 2010 – 2025			
DESTINASI PARIWISATA	INDUSTRI PARIWISATA	PEMASARAN PARIWISATA	KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Pembangunan Daya Tarik Wisata/Atraksi Wisata	Pembangunan Struktur Industri Pariwisata	Pengembangan Pasar Wisatawan	Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta & Masyarakat
Pembangunan Prasarana	Daya Saing Produk Pariwisata	Pengembangan Citra Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Fasilitas Umum	Kemitraan Usaha Pariwisata	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Regulasi, serta Mekanisme Operational di Bidang Kepariwisata
Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Kredibilitas Bisnis	Pengembangan Promosi Pariwisata	
Pemberdayaan Masyarakat	Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam & Sosial Budaya		



Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata	Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, bertanggung jawab terhadap lingkungan	Menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan	Mengembangkan organisasi, SDM pariwisata untuk mendukung meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata
---	---	--	--

Sumber: Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia 2016-2019 Dalam Beta Budisetyorini, (2022)

Gambar 1.1 Pilar Pembangunan Kepariwisata

Dijelaskan bahwa untuk pengembangan pariwisata di daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 10 Tahun 2016 tentang RIPPDA. Salah satu faktor kunci suksesnya pengembangan pariwisata adalah dukungan regulasi. Peran regulasi sebagai payung hukum, sering kali menjadi tolak ukur kompleksitas pengembangan pariwisata. Semakin banyak regulasi yang mengatur maka akan semakin rumit pengembangan serta pengelolaan pariwisata, begitu juga sebaliknya. Pemerintah terus melakukan upaya regulasi, termasuk sektor pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan (Budisetyorini, 2022:2.7).

Setiap daerah di Indonesia memiliki khas dan keunikan baik dari segi keindahannya maupun adat istiadat yang ada di daerah tersebut sehingga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Diberkati dengan alam dan budaya yang melimpah, Indonesia memiliki banyak potensi wisata di daerah yang beragam.

Pulau Lombok merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana pulau yang memiliki potensi alam dan budaya, membuatnya menjadi salah satu dari 10 tujuan prioritas (Kebijakan Pemerintah No. 50, 2011) yang merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. Adapun 10 destinasi prioritas tersebut adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Kelayang (Lampung), Borobudur, (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Labuhan Bajo (NTT), Morotai (Maluku), dan Mandalika (NUSA Tenggara Barat). Selain itu, destinasi prioritas merupakan salah satu strategi untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan di tahun 2019. Dengan dibentuknya destinasi prioritas diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pengembangan destinasi serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata (Budisetyorini, 2022:2.12).

Salah satunya adalah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah menjadi salah satu dari *five Super Priority Tourism Destination* Indonesia (Kemenparekraf, 2019). Berdasarkan rapat terbatas pengembangan (DSP) pada tanggal 15 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan lima DSP, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo, Likupang, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk

menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (UU No. 39/2009). Pembentukan KEK bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan strategi untuk meningkatkan penanaman modal dengan cara menyiapkan satu kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomis dan geostrategis. Kawasan tersebut akan fokus memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tujuan dari pengembangan tersebut adalah untuk mempercepat pengembangan daerah dan bisa juga dijadikan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Hal ini tentunya menjadi daya tarik untuk menciptakan sinergi dalam membangun pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai dengan (PP No. 52/2014) Prov. NTB tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bahwa Kehadiran KEK Mandalika menjadi tanda keseriusan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, pembangunan KEK di pulau Lombok berdampak positif membantu mengembangkan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempersiapkan Nusa Tenggara Barat mendunia. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah wisata.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah yang sangat diuntungkan di dalam KEK Mandalika, hal ini juga didukung dengan adanya Lombok

International Airport dan hotel-hotel berbintang yang sudah mulai beroperasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggap merespon adanya bandar udara Lombok *International Airport* dengan membentuk *brand* “Mandalika The Heart of Lombok” bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata serta pengembangan bidang pariwisata serta untuk meningkatkan amenitas diseluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pengembangan destinasi pariwisata tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah.

Para pelaku pariwisata diharapkan lebih giat dalam melakukan tindakan analisis potensi terhadap daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap daya tarik wisata untuk kemudian mencari solusi terbaik. Langkah lainnya adalah promosi dengan media sosial, media cetak, maupun MoU dengan instansi lain agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan objek-objek tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya. Oleh sebab itu, pengembangan amenitas di destinasi pariwisata diharapkan mampu membuat nyaman wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Lombok Tengah, serta mampu meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara dan kunjungan mancanegara.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah turut mendukung pengembangan di daerah dan memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri, terkait hal ini Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang

dan tuntutan yang lebih besar untuk menggali, mengkaji dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pemerintah menyadari besarnya potensi kawasan wisata di daerah dan berusaha mengembangkan serta membangun aset daya tarik dan destinasi pariwisata. Hal tersebut merupakan langkah awal bangkitnya proses produksi dalam sektor industri sehingga menguntungkan suatu daerah khususnya pada pertumbuhan ekonominya (Hartati, 2021).

Salah satu kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan adanya potensi wisata desa wisata Sasak Ende, yang merupakan objek wisata penyangga dalam mendukung pengembangan wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mengingat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya produk wisata budayanya yang masih asri serta lingkungan alam sekitar maupun keanekaragaman sosial dan budaya terlebih kondisi permukiman berupa kearifan lokal sebagai pendukungnya. Desa wisata ini dianggap sebagai salah satu dari tujuh desa adat di Lombok yang masih menjaga, dan melestarikan budaya masyarakat setempat dan merupakan cerminan asli dari suku Sasak Lombok dan dihormati oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Produk wisata budaya Sasak Ende didukung dengan keaslian adat dan istiadat kehidupan masyarakat lokal. Mengingat kearifan lokal dan potensi yang ada di Desa Wisata Sasak Ende, maka hal tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Desa Wisata Sasak Ende tepatnya berada di Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Di desa wisata Sasak Ende para wisatawan bisa berintraksi dengan masyarakat lokal, menginap, menikmati pemandangan rumah adat pada masanya, serta melihat pertunjukan atraksi berupa tari gendang beleq, tari peresean, tenunan ikat juga ada, serta wisatawan mengikuti proses pengepelan lantai dasar rumah adat yang dibuat dari campuran kotoran sapi atau kerbau. Ini menjadi daya tarik wisata yang sangat menarik terutama wisatawan yang berasal dari kota. Namun berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa pengembangan Desa Wisata Sasak Ende saat ini masih belum optimal.

Desa Wisata adalah tempat-tempat alami diluar perkotaan yang terdiri dari wilayah pertanian, peternakan, dengan jumlah penduduk sedikit yang dilengkapi dengan akomodasi ramah lingkungan. Desa wisata dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan adat istiadat yang berkembang didalamnya (Peranginangin, 2025).

Tentunya pengembangan desa wisata di Indonesia perlu mengikut sertakan partisipasi masyarakat yang sadar akan aktivitas wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi wisata pada suatu desa. Pokdarwis juga berperan sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.

Penerapan konsep Pariwisata Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) pada desa wisata merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan manfaat pariwisata. Dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan desa tersebut. Konsep Pariwisata Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) didefinisikan sebagai kerangka pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Dalam konsep ini, masyarakat setempat memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata.

Berdasarkan latar belakang sesuai yang telah dipaparkan di atas bahwa peneliti tertarik untuk membahasnya dalam Tesis dengan judul **“Pengembangan Desa Wisata Sasak Ende Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya (Syafnidawaty, 2020).

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pernyataan dengan indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian aspek yang diteliti tersebut berguna memberikan arah dan memperjelas jalinan penomena yang akan diteliti (Sarif Udin, 2018). Penelitian ini berfokus pada **“Pengembangan Desa Wisata Sasak Ende Berbasis *Community Based***

***Tourism* (CBT) Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”.**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada maka dengan ini peneliti membuat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja potensi budaya yang dimiliki Sasak Ende di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah saat ini?
2. Bagaimana merencanakan konsep pengembangan Desa Wisata Sasak Ende berbasis *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana Konsep Pengembangan Desa Wisata Sasak Ende Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) untuk meningkatkan kunjungan wisata di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab poin permasalahan pada rumusan masalah di atas. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan potensi budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Sasak Ende di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan rencana konsep pengembangan Desa Wisata Sasak Ende berbasis *community based tourism* (CBT) di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep pengembangan Desa Wisata Sasak Ende berbasis *Community Based Tourism* (CBT) untuk meningkatkan kunjungan wisata di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata khususnya terkait penerapan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT).
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengembangan desa wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT).
3. Menambah literatur dalam kajian pariwisata mengenai strategi pengembangan desa wisata budaya di Indonesia, khususnya Desa Wisata Sasak Ende.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian

yang diperoleh dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai ilmu kepariwisataan khususnya mengenai Pengembangan desa wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi dalam menyusun kebijakan serta program pengembangan desa wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT).

3. Bagi Pengelola Desa Wisata/Pokdarwis

Diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan pengembangan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

4. Bagi Masyarakat Lokal

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya.

5. Bagi Wisatawan

Diharapkan wisatawan mendapatkan ilmu baru tentang kehidupan masyarakat lokal di Desa Wisata Sasak Ende. Hal tersebut dikarenakan konsep pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) didefinisikan sebagai kerangka pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Artinya masyarakat setempat memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan, serta kemajuan desa wisata di masa mendatang.